

**EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA
DALAM MENINGKATKAN ARUS WISATAWAN MANCANEGARA KE
INDONESIA TAHUN 2015-2017
(STUDI KASUS: WISATAWAN CHINA)**

(Skripsi)

Oleh

**Anggun Siska Amalia
1516071048**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

ABSTRACT

THE EVALUATION OF A POLICY OF INDONESIA FREE VISITING VISA IN INCREASING FOREIGN TOURISTS IN 2015-2017 (CASE STUDY: CHINA'S TOURISTS)

By

Anggun Siska Amalia

The objective of this research is for evaluating the policy of Indonesia Free Visiting Visa in increasing foreign tourists especially tourists from China in 2015-2017. By using a foreign policy and evaluation theory as the main theory, the writer also uses descriptive qualitative method with the primary and secondary data which from interviewing with some related official site of immigration resources and valid site of tourism ministry, central of statistic and other bonafide site, and also some research earlier. Meanwhile, the data collection technique of this research uses document research, library studies and interview studies. Based on the research of a policy of Free Visiting Visa, Indonesia generally can reach its objective for increasing the coming of many tourists from foreign countries and of course it can add the economics matters from tourism sector if we observe it from the tourism devisa that can exceed the target, but the policy is not so effective for the tourists from China. It is true that there is a rising presentase of their coming after our country decides the policy of Free Visiting Visa, but it is not so essential because there is only 1 percent each year and they only contribute 0,9 percent tourism devisa for our country, moreover there are a lot of infractions which are dominated by chinese tourists such as overstay, imigratin fractions, and many others fractions that have relation with the facilities of the policy of Free Visiting Visa. Those are not satisfied our government since we really hope much from the tourists of China by determining Chinese tourists as the first target of our tourism market.

Keywords: free visiting visa, evaluation, immigration, tourism, China's tourists, devisa.

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN ARUS WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA TAHUN 2015-2017 (STUDI KASUS: WISATAWAN CHINA)

Oleh

Anggun Siska Amalia

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Indonesia dalam meningkatkan arus wisatawan mancanegara khususnya wisatawan China pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan luar negeri dan teori evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta dari situs resmi Imigrasi, situs resmi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), situs bonafit lainnya, dan penelitian jenis terdahulu. Lalu, teknik analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Indonesia secara *general* mampu mencapai tujuannya, yaitu adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan dan pertumbuhan perekonomian melalui sektor pariwisata juga meningkat dilihat dari pemasukan devisa pariwisata yang melampaui target. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif bagi wisatawan China Persentase kunjungan wisatawan China setelah diberlakukan BVK memang ada peningkatan namun tidak terlalu pesat, hanya meningkat sebesar 1% setiap tahunnya. Serta terkait kontribusi wisatawan China hanya menyumbang sebesar 0,9% terhadap devisa pariwisata RI. Selain itu terdapat pelanggaran-pelanggaran yang didominasi oleh WNA China setelah kebijakan ini diberikan, seperti overstay, pelanggaran keimigrasian, serta pelanggaran menggunakan fasilitas BVK. Hal tersebut tentunya dinilai kurang memuaskan, terlebih pemerintah Indonesia menaruh harapan yang cukup besar pada negara China dengan menetapkan wisatawan China sebagai target utama pasar pariwisata

Kata kunci: bebas visa, evaluasi, imigrasi, pariwisata, wisatawan China, devisa.

**EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN INDONESIA
DALAM MENINGKATKAN ARUS WISATAWAN MANCANEGARA KE
INDONESIA TAHUN 2015-2017 (STUDI KASUS: WISATAWAN CHINA)**

Oleh:

Anggun Siska Amalia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUBUNGAN
INTERNASIONAL (S. Hub. Int)**

Pada

**Program Strata Satu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN
INDONESIA DALAM MENINGKATKAN ARUS
WISATAWAN MANCANEGERA DI INDONESIA
TAHUN 2015-2017
(Studi Kasus: Wisatawan China)**

Nama Mahasiswa : **Anggun Siska Amafia**

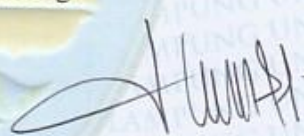
No. Pokok Mahasiswa : **1516071048**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

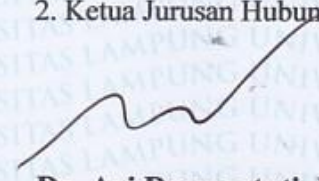
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580709 198603 1 002


Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP 19920309 201903 2 020

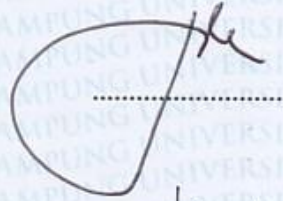
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

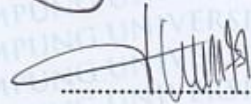
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



Sekretaris : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



**Penguji
Bukan Pembimbing: Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : 30 Juni 2020



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2020

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPAH
Anggun Siska Amalia
1516071048

Catatan

Pernyataan ini diletakkan pada halaman setelah abstrak.

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Anggun Siska Amalia. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 06 Desember 1997 yang merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Iskandar Zulfa Ali S.H dan Ibu Dra. Siti Aminah. Penulis adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara dengan 1 saudara dan 1 saudari, yaitu Muhammad Arief Budiman dan Dian Siska Lestari.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada tahun 2002-2003. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar I Bandar Lampung pada tahun 2009, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Azhar 3, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Bandar Lampung pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Strata-1 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung pada tahun 2015 dengan konsentrasi studi pada Ekonomi Politik Internasional.

Saat ini pun penulis masih tercatat sebagai jurnalis di salah satu Media Online Kabarsiger.com. Sebelumnya, pada tahun 2014 penulis mengikuti kegiatan magang di Graha Pena Lampung (Radar TV). Penulis juga pada masa kuliah berkesempatan mengikuti kegiatan organisasi dalam kampus yaitu HMJ HI UNILA pada divisi *Marketing and Communication* pada tahun 2015. Serta berkesempatan melaksanakan kegiatan magang di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

“Never fear that you cannot do a certain thing, that you cannot bring out certain qualities from within you, that you cannot overcome obstacles on your path. Remember that all things are possible to a power which governs the whole universe and that you are the very embodiment of that power.”

-Eugene Fersen-

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku:

Bapak Iskandar Zulfa Ali & Ibu Siti Aminah

Kakak & Uni:

Muhammad Arief Budiman & Dian Siska Lestari

Keponakanku:

Sheza Lanika Yorawan

Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tidak menyerah pada
kehidupan

Serta Almamaterku :

Universitas Lampung

Yang telah memberikanku banyak pengalaman hidup selama menempuh
pendidikan di Jurusan **Hubungan Internasional**

SANWACANA



Allhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat, kasih serta ridho-Nya penulis diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia Dalam Meningkatkan Arus Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Tahun 2015-2017 (Studi Kasus: Wisatawan China)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dari segi substansi maupun penulisan, serta dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak yang bersedia untuk memberikan dukungan serta saling bertukar pikiran demi kelangsungan penelitian penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, dan kekuatan yang telah Engkau berikan dalam melancarkan skripsi ini.

2. Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Intrnasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Gita Kharisma S.IP, M. Si., selaku Dosen Penguji skripsi yang selalu bersedia memberikan saran serta kritik yang membangun untuk melakukan perbaikan skripsi menjadi lebih baik/
6. Ibu Tety Rachmawati S.IP, M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala kesabaran, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulisan skripsi.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh Staf dan Karyawan FISIP Universitas Lampung, khususnya dalam jurusan Hubungan Internasional.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan magang di sela-sela perkuliahan serta menjadi inspirasi penulis dalam mengambil tema skripsi yang masih berkaitan dengan lingkup keimigrasian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.

10. Kepada Bapak Melyansyah S.IP, Analis Keimigrasian Pertama yang bertugas di kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Jambi, selaku narasumber dalam penelitian penulis yang sangat membantu keberlangsungan penelitian penulis. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan menjawab pertanyaan penulis dengan seksama.
11. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Iskandar Zulfa Ali S.H dan Ibu Dra. Siti Aminah yang merupakan inspirasi terbesar penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan serta doa yang tidak henti-hentinya Papa & Mama panjatkan kepada Allah SWT untuk setiap kelancaran anak-anaknya dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas segala nasihat, kasih sayang, serta didikan kalian yang mampu membuat penulis akhirnya mampu berada pada tahap ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang bagi kita semua agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.
12. Kepada kakak-kakak penulis, M. Arief Budiman S.H dan Dian Siska Lestari S.E, Terimakasih banyak atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Ponakan penulis yang sangat lucu dan giginya baru tumbuh, Sheza Lanika Yorawan, terima kasih telah hadir dan menjadi hiburan keluarga dan binda. Semoga Sheza tumbuh menjadi sosok perempuan yang cerdas, pandai memanusiaikan orang lain, serta selalu dipenuhi dengan keberuntungan.
14. Kepada seluruh teman-teman Hubungan Internasional Angkatan Tahun 2015. Terima kasih telah menjadi bagian dari penulis selama perkuliahan

berlangsung. Khususnya kepada teman-ku Wita Nurmela, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.

15. Kepada teman-teman yang sangat dekat dengan penulis di perkuliahan, Anindya Nur Rahmi, Melinda Putri Aryanti, Susi Fuji Sahestina, Riska Nurhafizhah, dan Nyiayu Vannisa Cahyani, terima kasih telah berbagi cerita, canda tawa serta motivasi yang selalu mengalir dari kalian. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta rezeki yang baik dari Allah SWT. Serta kesuksesan menghampiri kita semua.

16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, doa dan pelajaran hidup. Terimakasih kepada seluruh pihak, semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 30 Juni 2020

Penulis,

Anggun Siska Amalia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri.....	16
2.2.2 Teori Evaluasi.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.....	30
4.1.1. Jenis-jenis Visa.....	31
4.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia.....	33
4.3 Kebijakan BVK Indonesia Terhadap Wisatawan China.....	36
4.3.1. Hubungan Diplomatik Indonesia-China.....	37
4.3.2. Kerjasama China-Indonesia di Bidang Pariwisata.....	39

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Indikator Input	45
5.1.1 Sumber Daya Manusia	45
5.2.2 Anggaran Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia	46
5.2.3 Infrastruktur Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia	47
5.2 Indikator Process	51
5.2.1 Proses Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia	51
5.2.2 Proses Promosi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia.....	54
5.3 Indikator Outputs.....	57
5.3.1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara.....	57
5.3.2 Persentase Kunjungan Wisatawan China Ke Indonesia Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Bebas Visa Indonesia	59
5.3.3 Pengeluaran Rata-Rata Wisatawan China Setelah Diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan Indonesia.....	61
5.3.4 Pendapatan Indonesia dari Visa On Arrival Setelah Berlakunya Bebas Visa Kunjungan Indonesia.....	64
5.4 Indikator Outcomes	66
5.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Devisa Pariwisata Setelah Diberlakukannya Bebas Visa.....	66
5.4.2. Kontribusi Wisatawan China Terhadap Devisa Pariwisata RI Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan....	68
5.4.3 Peningkatan Orang Asing Overstayer	70
5.4.4 Peringkat Terbesar WNA dikenakan Pro Justitia	72
 KESIMPULAN DAN SARAN	 78
6.1 Kesimpulan.....	78
6.2 Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	 83
LAMPIRAN	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. 10 Besar Negara Penyumbang Wisman Terbanyak ke Indonesia	3
2. Rata-Rata Pengeluaran Wisman China Ke Indonesia 2012-2014	4
3. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisman	62
4. Kunjungan Wisman China ke Indonesia 2012-2017	63
5. Rata-Rata Pengeluaran Wisman China 2015-2017	64
6. Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran Wisman	66
7. Penggunaan VOA	67
8. Target Dan Realisasi Devisa Pariwisata RI	69
9. Kontribusi Wisman China Pada Devisa RI	70
10. Orang Asing Overstayer	72
11. Tindakan Pro Justitia	73
12. Pelanggaran Negara Menggunakan BVK	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	15
2. Indikator Evaluasi Kebijakan	43
3. Pengawasan & Pengamanan Bebas Visa	46

DAFTAR SINGKATAN

BVK	: Bebas Visa Kunjungan
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASITA	: <i>Association Of The Indonesian Tour and Travel Agencies</i>
CNTA	: <i>China National Tourism Association</i>
ZDT	: <i>Zero Dollar Tour</i>
WISMAN	: Wisatawan Mancanegara
BPS	: Badan Pusat Statistik
KEMENPAR	: Kementrian Pariwisata
SDM	: Sumber Daya Manusia
WNA	: Warga Negara Asing
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERPRES	: Peraturan Presiden
BSI	: Biro Statistik Indonesia
BFA	: <i>BOAO Forum For Asia</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
TOC	: <i>Transnational Organized Crime</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

ITAS	: Izin Tinggal Terbatas
TKA	: Tenaga Kerja Asing
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
ITK	: Izin Tinggal Kunjungan
ITAP	: Izin Tinggal Tetap
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KAA	: Konfrensi Asia Afrika
MENLU	: Menteri Luar Negeri
VOA	: <i>Visa On Arrival</i>

BAB I

PENDAHULUAN

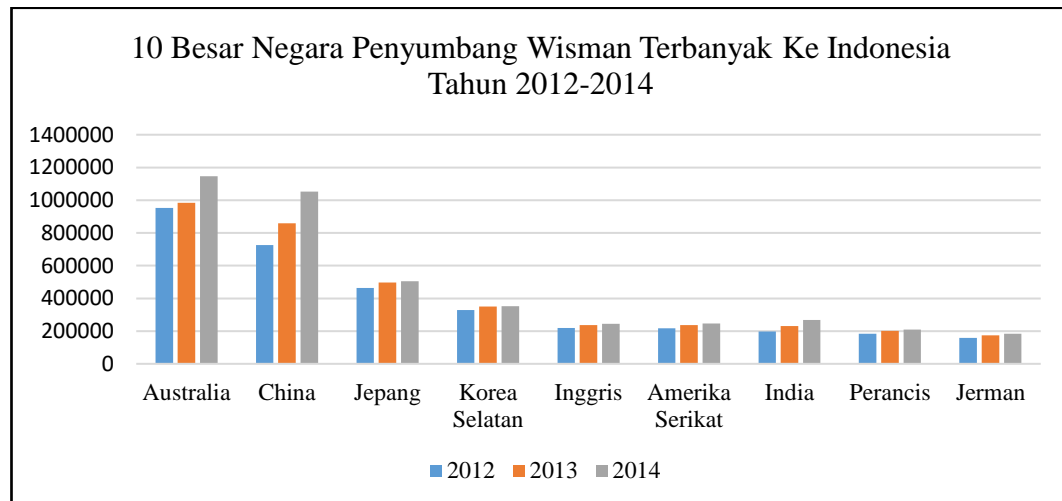
1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kepentingan nasional masing-masing yang dapat dicapai dengan beragam upaya, terutama dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Hal ini yang turut serta dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara, salah satunya melalui sektor pariwisata dengan menetapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sebagai upaya untuk meningkatkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut, menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara melalui devisa yang dihasilkan para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Kebijakan BVK adalah pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta untuk meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara (Imigrasi RI, 2019). Sementara, kebijakan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA), pemerintah wilayah administratif suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Perpres RI No. 21, 2016).

Kebijakan BVK Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 2003 bagi 11 (sebelas) negara sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati. Kebijakan ini kemudian mengalami penambahan negara menjadi 15 (lima belas) negara, mencakup 9 (sembilan) anggota negara ASEAN lainnya, yaitu Maroko, Peru, Hongkong, Macau, Ekuador, dan Chili pada tanggal 18 Juli 2011. Lalu kebijakan ini di revisi kembali dengan ditambahkannya 30 (tiga puluh) negara, meliputi Rusia, Republik Rakyat Tiongkok (China), Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Mexico, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan, sehingga total negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia ada 45 negara yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2015 (Perpres No.18, 2011). Sedangkan amandemen terbaru terkait kebijakan ini terletak pada tahun 2016 sehingga total keseluruhan negara yang diberikan fasilitas BVK Indonesia menjadi 169 negara (Perpres RI No. 21, 2016).

Penulis memandang bahwa keputusan Pemerintah Indonesia yang melakukan revisi terkait penambahan jumlah negara tersebut berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisatawan yang juga berdampak terhadap pemasukan negara. Menilik di awal kebijakan BVK Indonesia yang diberlakukan bagi 15 negara pada tahun 2011, pertumbuhan wisman rata-rata perbulan hanya 0,67%. Sedangkan, semenjak adanya revisi untuk penambahan 15 negara lainnya menjadi 30 negara pada tahun 2015, pertumbuhan rata-rata kunjungan wisman meningkat menjadi 2,43% dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juni sampai Agustus Tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2017).

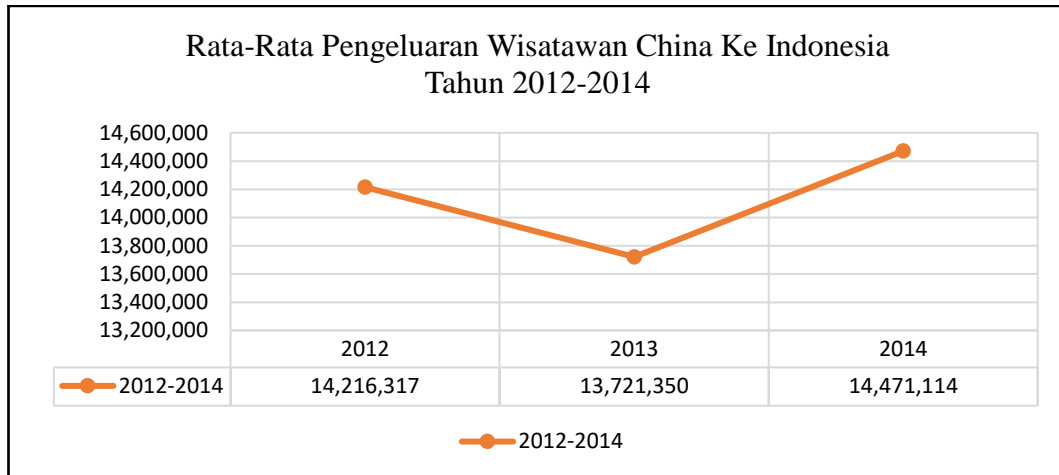
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), berikut 10 besar negara yang menyumbang total kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2012-2014:



Grafik 1.1.1. 10 Besar Negara Penyumbang Wisman Terbanyak Ke Indonesia Tahun 2012-2014

Sumber: Diolah dari laporan BPS, 2017.

Berdasarkan grafik 1.1.1, secara total, tiga (3) peringkat terbesar diduduki oleh Australia dengan menyumbang wisman sebanyak 3.082.204 kunjungan, China dengan total 2.636.933 kunjungan dan Jepang menyumbang sebanyak 1.466.060 kunjungan. Kemudian disusul oleh Korea Selatan dengan total 1.032.047 kunjungan, Inggris dengan total 701.114 kunjungan. Lalu, disusul oleh Amerika Serikat, India, Perancis, dan Jerman. Namun, grafik tersebut juga menunjukkan bahwa China adalah satu-satunya negara yang menyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan peningkatan jumlah wisatawan yang drastis sebelum masuk ke dalam daftar negara yang menerima BVK Indonesia. Selain itu, merujuk pada data Biro Statistik Indonesia (BSI), wisatawan China rata-rata menghabiskan di atas US\$ 1000 pada periode tahun 2012-2014 dengan rincian yang terlihat dalam grafik di bawah ini:



Grafik 1.1.2. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan China Ketika Berkunjung ke Indonesia Tahun 2012-2014

Sumber: Diolah dari laporan BPS, 2017.

Berdasarkan grafik 1.1.2., wisatawan China di Indonesia rata-rata menghabiskan sebesar Rp. 14.199.106,- (US\$ 1.040,38) pada tahun 2012, kemudian menurun menjadi Rp. 13.704.912,- (US\$ 1.004,17) pada tahun 2013, dan kembali naik menjadi Rp. 14.453.777,- (US\$ 1.059,04) pada tahun 2014. Apabila dijumlahkan, rata-rata pengeluaran belanja wisatawan China di Indonesia menghabiskan dana sebesar Rp. 42.357.795,- atau setara US\$ 3.103,59 dalam kurun waktu tiga tahun tersebut.

Pada penjelasan yang telah dipaparkan di atas terlihat dari tahun 2012-2014 dari segi peningkatan kunjungan serta peningkatan rata-rata pengeluaran dari wisatawan China, hal ini yang akhirnya menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia memasukkan China ke dalam daftar BVK Indonesia pada tahun 2015, terlebih pemerintah menaruh harapan yang besar dari wisatawan China untuk meningkatkan perekonomian negara dari sektor pariwisata, terbukti setelah memberlakukan kebijakan BVK bagi China, pemerintah mulai menetapkan China sebagai fokus utama pasar pariwisata Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan BVK Indonesia mencapai tujuannya, terlebih setelah memberlakukan kebijakan ini bagi wisatawan China.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah **“Bagaimana evaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia dalam meningkatkan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia Tahun 2015-2017 (Studi kasus: wisatawan China) ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan BVK Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian negara dalam studi kasusnya terhadap wisatawan China.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori & konsep-konsep Hubungan Internasional, yaitu teori kebijakan luar negeri dan teori evaluasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi dan memahami kebijakan bebas

visa kunjungan Indonesia yang telah diterapkan demi tercapainya kepentingan nasional dari sektor non-migas, serta meminimalisir dampak negatif dari adanya kebijakan bebas visa kunjungan sehingga pemberlakuan kebijakan tersebut bebas visa kunjungan Indonesia dapat dilihat berjalan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh warga negara asing.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi peneliti pada tingkat strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur buku serta penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sebagai landasan untuk membangun kerangka pemikiran penelitian. Terdapat satu literatur buku dan jurnal serta tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi ini, lebih konkritnya diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jazim Hamidi dan Charles Christian, dengan judul buku *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, sebagaimana judul buku yang tertera, penulis buku mengemukakan tentang definisi serta ruang lingkup keimigrasian, dasar-dasar hukum keimigrasian, konsep perizinan orang asing di Indonesia serta implementasi hukum yang berlaku. Dalam bab pertama buku ini penulis menjelaskan bahwa istilah imigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta memiliki tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru.

Dari sudut pandangan yang primitif, pola migrasi lebih dimaksudkan pada usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan bahaya yang mengancam seperti bencana alam, konflik yang sedang terjadi di negara asal. Selain itu di dalam buku

ini pun dipaparkan ruang lingkup keimigrasian yang mencakup berbagai bidang, seperti bidang politik yang mana di satu sisi sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana di sisi lain juga mengatur kewarganegaraan seseorang.

Di samping itu juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Di bidang politik fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, yaitu berdasarkan hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Selain bidang politik pula terdapat juga bidang ekonomi yang tampak jelas sekali keterkaitannya dalam pertumbuhan dan perkembangan perkonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, dari bidang sosial budaya yang tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi individu serta kelompok karena adanya pergerakan dan perpindahan manusia, serta dari bidang keamanan sendiri yang mencakup dari segala aspek untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara.

Penulis juga menjelaskan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana latar belakang UU ini dibentuk akibat bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat, penulis menyampaikan bahwa UU No 6. Tahun 2011 memiliki penekanan pada beberapa aspek yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnational Organized Crime* (TOC). Terdapat konsep yang dijelaskan juga dalam buku ini yaitu konsep kewenangan, yaitu asas legalitas yang memiliki makna *dat het bestuur aan de wet is onderworpen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang). Penerapan

konsep kewenangan ini menurut Indroharto, akan menimbulkan berlakunya kepastian hukum dan kesamaan hukum.

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Hasil kesimpulan dari buku ini pun menjelaskan bahwa orang asing yang berada di wilayah NKRI memiliki hak dan kewajibannya tersendiri, salah satunya hak untuk menikahi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun ternyata jadi disharmoni dikarenakan orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA dianggap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, namun hal tersebut sulit diperdebatkan dikarenakan HAM. Adapun buku karya Jazim Hamidi dan Charles Christian ini akan menjadi bahan referensi penulis dikarenakan kaitannya dengan keimigrasian.

Kedua adalah Athira Maulidina, Mahasiswi jurusan Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, yang melakukan penelitian dengan judul skripsi *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI*. Fokus dalam penelitian Athira lebih pada potensi ancaman yang ditimbulkan dari adanya penerapan kebijakan bebas visa tersebut yang pada awalnya bertujuan untuk menarik para wisman untuk berlibur ke Indonesia namun ternyata kebijakan tersebut disalahgunakan oleh turis asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia.

Dalam penelitian Athira ini pun melihat banyaknya para pekerja asing asal Tiongkok mencari lahan pekerjaan di Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi serta tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Kebijakan bebas visa sendiri menghadirkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyamar sebagai wisatawan dimana banyaknya warga negara Tiongkok yang kerap menyelundupkan narkoba, kejahatan siber, dan kasus yang paling marak terjadi adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang semua kasus tersebut berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

Dalam penelitian ini, konsep hubungan bilateral cukup menggambarkan fenomena yang terjadi, adanya hubungan timbal balik yang diharapkan oleh kedua belah pihak, Tiongkok dan Indonesia, terutama Indonesia sendiri memberlakukan kebijakan bebas visa tersebut untuk meningkatkan devisa non migas, serta dari sisi pariwisata untuk menambah pemasokan nilai ekonomi yang tentunya dengan berlakunya bebas visa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Hasil dari penelitian ini pada akhirnya menemukan bahwa selama 1 tahun berlangsungnya kebijakan bebas visa banyak pelanggaran yang terjadi, pro dan kontra yang saling berhadapan akibat maraknya keberadaan tenaga kerja asing menimbulkan adanya gesekan antara budaya dan adat istiadat yang jauh berbeda antara pekerja lokal serta pekerja asing. Maka dari itu sudah sepantasnya pemerintah Indonesia menyikapi meningkatnya tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok dari segi kualitas maupun kuantitas. Adapun penelitian Athira Maulidina akan menjadi bahan referensi penulis dikarenakan penelitian tersebut juga membahas kebijakan BVK Indonesia sesuai dengan penelitian penulis

Ketiga, Erna Rahayu, S.H, dengan judul penelitian *Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Asing Ilegal (Studi di Kalimantan Barat)*. Dalam penelitian kali ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun fokus masalah yang dijabarkan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu keterkaitan tenaga kerja asing ilegal pada wilayah Kalimantan Barat.

Penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya peningkatan tenaga kerja asing China di provinsi Kalimantan Barat. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini peneliti banyak menjabarkan kasus-kasus serbuan tenaga kerja asal China yang memasuki provinsi Kalimantan Barat yang mana peneliti menyatakan bahwa mayoritas tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah tersebut tidak memenuhi perizinan, sedangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerja asing yang boleh bekerja di dalam negeri adalah tenaga kerja yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal, sedangkan pada kenyataan di lapangan, para tenaga kerja asing asal China pun menjadi buruh kasar yang notabenenya mampu dilakukan oleh pekerja lokal. Penelitian ini sekaligus dapat menjadi instrumen tambahan bagi penulis dalam mengevaluasi kebijakan BVK Indonesia.

Keempat, Taryono, Rita Yani Iryan, dan Rahmita B. Ningsih, jurnal ekonomi dengan judul penelitian *Studi Tentang Migrasi dan Implikasinya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan*. Para peneliti merupakan para mahasiswa/i Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau. Penelitian ini pun berfokus pada salah satu wilayah di Indonesia, yaitu salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Para peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif yang dipakai untuk menganalisis faktor pendorong, penarik, dan penghambat arus migrasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini cenderung lebih berfokus pada pola migrasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini menyatakan bahwa secara umum laju perkembangan penduduk yang terjadi pada Kabupaten Pelalawan bukan disebabkan oleh angka kelahiran, melainkan akibat tingginya arus migrasi dan hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya angka kemiskinan pada wilayah-wilayah pedalaman di Kecamatan Kerumutan, dan Kecamatan Kuala Kampar, hal ini ditenggarai oleh para migran yang memasuki kesempatan kerja sebagai buruh tani. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Taryono dkk karena penelitian ini akan berfokus pada kebijakan BVK Indonesia, namun studi tentang migrasi dalam jurnal ini menjadi bahan referensi bagi tulisan penulis.

Kelima, **Supriadi Purwanto dan Wang Ling**, sebuah studi literatur dengan judul *Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri*. Penulis merupakan peneliti Glorious Sun School of Business Administration, Donghua University, China. Studi literatur milik peneliti berbeda dengan para peneliti yang telah

dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian pada literatur ini adalah melihat perilaku para wisman China ketika melakukan wisata luar negeri (*Outbound Tourism*)

Menurut peneliti, pariwisata merupakan salah satu industri yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor ekonomi negara-negara, dan wisatawan China menjadi wisatawan yang banyak dilirik sejumlah negara dikarenakan seiring dengan reformasi ekonomi, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita telah meningkat dengan sangat cepat, ditambah kebijakan pemerintah China yang memberikan fasilitas untuk masyarakatnya dengan memberikan libur resmi dan sistem cuti bagi karyawan yang hal ini membuat para wisatawan China meningkat untuk berlibur ke sejumlah negara.

Peneliti mengungkapkan bahwa dari perkembangan pariwisata masyarakat China tersebut Indonesia dapat merancang produk wisata yang dapat disesuaikan dengan karakteristik atau perilaku wisatawan China dalam meraih wisatawan outbound dari China. peneliti juga sedikit menyinggung kontribusi wisatawan China dalam sektor pariwisata Indonesia, yang pada akhirnya membuat pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kebijakan BVK Indonesia sebagai tujuan utama dari industri pariwisata untuk wisma, terutama China.

Dalam literatur ini juga dibahas mengenai keunikan karakteristik wisatawan China, perilaku wisatawa China dan kaitannya dengan media sosial, serta karakteristik konsumsi wisatawan China yang keseluruhannya dapat menjadi referensi pemerintah Indonesia untuk semakin melakukan kegiatan yang menarik minat wisatawan China untuk berlibur ke Indonesia. Studi literatur ini dapat

menjadi bahan kajian bagi penulis dalam penelitiannya terkait dengan perilaku wisatawan China ketika berlibur ke luar negeri.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Komponen Penelitian	Jazim Hamidi, dkk (2015)	Athira Maulidina (2017)	Erna Rahayu (2016)	Taryono, dkk (2009)	Wang Ling, dkk (2016)	Penulis (2020)
1	2	3	4	5	6	7
Topik Penelitian	Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia	Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI.	Dampak kebijakan bebas visa bagi warga negara China (RRC) terhadap munculnya tenaga kerja ilegal (studi di Kalimantan Barat).	Studi Tentang Migrasi dan Implikasinya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan.	Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok di Luar Negeri: Sebuah Studi Lieratur	Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia Dalam Meningkatkan Arus Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2015-2017 (Studi Kasus: Wisatawan China).
Objek Penelitian	Perizinan orang asing di Indonesia serta implementasi hukum yang berlaku.	Kebijakan pemberlakuan bebas visa yang berdampak pada TKA ilegal asal Tiongkok	Kebijakan bebas visa yang diterapkan bagi WNA China yang berfokus pada hadirnya tenaga kerja ilegal di Kalimantan Barat	Faktor pendorong, penarik, dan penghambat arus migrasi serta dampaknya pada kemiskinan di provinsi Riau	Karakteristik wisatawan Tiongkok ketika melakukan wisatawan luar negeri untuk motivasi dan pengembangan pariwisata	Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia yang diberikan pada Wisatawan China.
Metode Penelitian	Kualitatif	Kuatitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Teori dan Konsep	Konsep Kewenangan	Konsep Hubungan Bilateral	Konsep Kedaulatan	Teori Migrasi	Konsep Pariwisata, Teori Perilaku Manusia (<i>Human Behaviour</i>)	Teori Kebijakan Luar Negeri, Teori Evaluasi.
Hasil Analisis	Orang asing yang berada di wilayah NKRI memiliki hak dan kewajibannya tersendiri serta Peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku menurut pendapat penulis tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap WNA.	Selama 1 tahun berlangsungnya kebijakan bebas visa banyak pelanggaran yang terjadi, pro dan kontra yang saling berhadapan akibat maraknya keberadaan tenaga kerja asing menimbulkan adanya gesekan antara budaya dan adat istiadat yang jauh berbeda antara pekerja lokal serta pekerja asing	Mayoritas tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah tersebut tidak memenuhi perizinan, sedangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerja asing yang boleh bekerja di dalam negeri adalah tenaga kerja yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal, sedangkan pada kenyataan di lapangan, para tenaga kerja asing asal China pun menjadi buruh kasar.	Secara umum laju perkembangan penduduk yang terjadi pada Kabupaten Pelalawan bukan disebabkan oleh angka kelahiran, melainkan akibat tingginya arus migrasi dan hal tersebut memberikan dampak pada meningkatnya angka kemiskinan, hal ini ditenggarai oleh para migran yang memasuki kesempatan kerja sebagai buruh tani.	Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menarik wisatawan Tiongkok dengan update konten web maupun media sosial pariwisata Indonesia, peningkatan kualitas pemandu wisata dan juga dukungan pencitraan Indonesia.	kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Indonesia bagi wisatawan China dinilai kurang efektif dilihat berdasarkan tujuan kebijakan BVK Indonesia yaitu terkait pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perekonomian dari sektor pariwisata RI. Persentase kunjungan wisatawan China setelah diberlakukan BVK hanya meningkat sebesar 1% setiap tahunnya. Serta wisatawan China hanya menyumbang sebesar 0,9% terhadap devisa pariwisata RI.

Sumber: Data diolah oleh penu

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori Kebijakan Luar Negeri digunakan penulis dalam menjelaskan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia terhadap beberapa negara terkait kebijakan BVK. Kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan adalah cerminan dari tujuan atau kepentingan nasional dari sebuah negara terhadap lingkungan luarnya, dengan kata lain, Kebijakan Luar Negeri adalah sikap dan langkah yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (UU Nomor 37 Tahun 1999).

Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta *benefit* untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada. Menurut Rosenau, tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang.

Terdapat beberapa tahap-tahap dari kebijakan yaitu tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Salah satu tahap kebijakan yang menjadi fokus penulis adalah tahap evaluasi kebijakan, yaitu pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah

dibuat mampu mencapai kepentingan negara. Kebijakan luar negeri sangat luas aspeknya yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dari suatu negara. Berdasarkan penjelasan di atas, konsep ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dapat dinyatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, dalam penelitian penulis kali ini, tujuan kebijakan BVK Indonesia adalah meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan memberikan manfaat pada perekonomian negara. Untuk mendapatkan jawaban terkait evaluasi kebijakan tersebut dibutuhkan Teori Evaluasi yang juga saling berkesinambungan dengan teori Kebijakan Luar Negeri yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

2.2.2 Teori Evaluasi

Teori Evaluasi digunakan penulis sebagai teori utama dalam penelitian kali ini. Evaluasi adalah suatu proses penilaian, penilaian tersebut dapat netral, positif atau negatif maupun gabungan di antara keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya pihak yang melakukan evaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya (Dan B Curtis, James J. Floyd, Jerry L. Winsor, 1996:443).

Teori evaluasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu evaluasi program, evaluasi kebijakan, evaluasi proyek, evaluasi material, dan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) (Wirawan, 2012:16-18). Dalam penelitian kali ini digunakan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau

program tertentu, sehingga dapat menentukan langkah di masa yang akan datang (Winarno, 2008:166).

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Winarno (2008:229), terdapat 3 (tiga) tipe evaluasi implementasi kebijakan, antara lain:

1. Tipe Pertama, yaitu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dianggap sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri
2. Tipe Kedua, yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan atau program-program tertentu, tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan sebuah kebijakan atau program.
3. Tipe Ketiga, yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif kebijakan yang dijalankan untuk melihat dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

Berdasarkan tipe-tipe yang telah dijabarkan di atas, tipe yang paling sesuai dengan penelitian kali ini adalah tipe ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis. Dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa acuan, merujuk dari Bridgman & Davis (2000) terdapat 4 (empat) elemen dalam melaksanakan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. *Input*, yaitu secara sederhana adalah hal-hal yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, mencakup hal-hal seperti sumber daya, anggaran, infrastruktur pendukung dan akomodasi lainnya.

2. *Process*, yaitu tindakan yang dilakukan oleh personil terkait tujuan kebijakan. Misalnya mencakup hal-hal seperti pertemuan masyarakat atau mengumpulkan data berkala untuk melihat kemajuan kebijakan.
3. *Outputs*, yaitu tingkat pertama hasil yang terkait dengan suatu kebijakan atau sebagai hasil jangka langsung. Maka dengan kata lain *outputs* adalah apa yang langsung atau segera didapatkan setelah kebijakan berjalan.
4. *Outcomes*, yaitu tingkat kedua dari hasil yang terkait dengan suatu kebijakan dan merujuk pada konsekuensi jangka menengah dari kebijakan tersebut, biasanya berhubungan dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Dengan kata lain, *outcomes* adalah manfaat serta dampak yang diterima khalayak ramai setelah kebijakan berjalan

Berdasarkan penjelasan di atas, teori ini digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan BVK dilihat melalui beberapa indikator yang telah dipaparkan di atas.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan BVK Indonesia Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2003, lalu pada tahun 2011 kebijakan BVK Indonesia yang mulanya hanya diperuntukkan bagi 15 negara termasuk negara anggota ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Maroko, Peru, Hongkong, Macau, Ekuador, dan Chili bertambah sebanyak 30 negara pada tahun 2015 guna meningkatkan devisa non migas dari sektor pariwisata, salah satu negara yang mendapatkan akses tersebut adalah China dengan mempertimbangkan asas *reciprocal* atau asas timbal balik dari negara-negara yang telah diberikan fasilitas BVK Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan BVK Indonesia selain sebagai

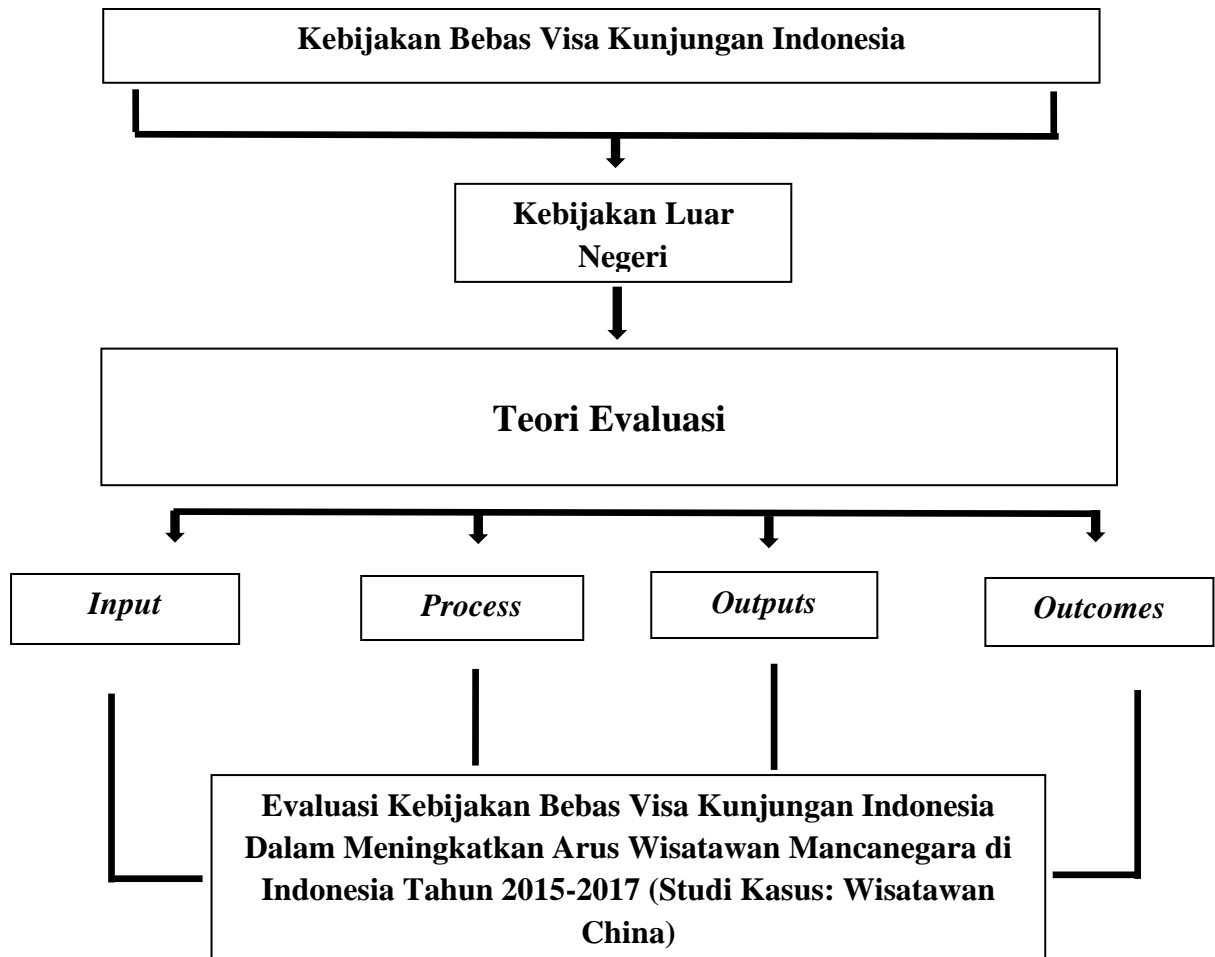
upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, juga sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian negara melalui sektor non-migas yaitu pariwisata melalui devisa yang dihasilkan oleh para wisatawan mancanegara yang berlibur ke Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan arus lintas masyarakat antar negara, Indonesia juga selain sebagai pemberi kewenangan warga asing untuk memasuki wilayah NKRI tentunya ingin adanya timbal balik dari kebijakan yang telah ditetapkan, salah satunya timbal balik dari negara China sebagai salah satu negara yang menjadi fokus utama pasar pariwisata RI.

Meski pemerintah berharap dengan adanya kebijakan BVK dapat meningkatkan potensi pembangunan ekonomi negara melalui sektor non-migas, namun, mengingat peran Indonesia dalam memberlakukan kebijakan BVK Indonesia ini pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta harus menghadapi resiko-resiko pelanggaran yang terjadi, maka dengan itu penulis ingin melakukan evaluasi sejauh mana kebijakan BVK Indonesia mampu mencapai tujuannya terlebih setelah memberikan kebijakan tersebut bagi wisatawan China pada tahun 2015-2017.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri (*foreign policy*) guna membantu penulis melihat dari sudut pandang salah satu tahap yang ada di kebijakan luar negeri yaitu terkait evaluasi kebijakan. Teori ini juga menjadi dasar bagi penulis untuk mengaitkannya dengan teori berikutnya, yaitu Teori Evaluasi. Teori Evaluasi (*evaluation*) penulis gunakan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif apakah kebijakan BVK Indonesia dapat dinyatakan berhasil ataupun tidak melalui 4 indikator, yaitu: indikator *input*, indikator *process*,

indikator *outputs*, indikator *outcomes*. Maka, kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam bagan di samping:

Bagan Kerangka Pikir

Bagan 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan metode menggambarkan evaluasi pada diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia terhadap arus wisatawan mancanegara ke Indonesia khususnya wisatawan China, sehingga tergolong ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subyek yang diteliti (Noor, 2017: 34). Metode penelitian kualitatif memiliki alasan penggunaannya dikarenakan peneliti dapat menggunakan metode ini untuk melakukan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui

penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2017: 34). Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan evaluasi kebijakan BVK Indonesia yang diberlakukan oleh Indonesia tahun 2015-2017 (studi kasus: wisatawan China) dilihat dari fokus penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi dalam penelitian. Fokus penelitian juga merupakan inti utama dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah dan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan. Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik.

Menurut Nawawi, bahwa fokus penelitian berfungsi menyusun indikator yang relevan untuk pengumpulan data, yaitu membedakan indikator penting dan tidak penting, dan untuk memproduksi data serta menjawab rumusan masalah itu sendiri (Nawawi, 2011 : 111). Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus penelitian adalah menjawab “Bagaimana evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia dalam meningkatkan arus wisatawan mancanegara di Indonesia Tahun 2015 2017 (studi kasus: wisatawan China)”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, agar tidak meluasnya bahasan penelitian, menggunakan 4 (empat) indikator berikut ini:

1. Indikator *Input*

Peneliti akan mendeskripsikan terkait SDM, anggaran, infrastruktur pendukung dalam kebijakan BVK Indonesia. Dalam indikator ini lebih jelasnya untuk mengevaluasi apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk keberlangsungan kebijakan BVK Indonesia.

2. Indikator *Process*

Peneliti akan mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan BVK Indonesia serta proses promosi Pariwisata Indonesia. Dalam indikator kedua ini, untuk lebih menjabarkan serta mengevaluasi proses-proses kebijakan ini dapat berjalan pada awal mulanya.

3. Indikator *Outputs*

Peneliti akan mendeskripsikan terkait hasil langsung atau yang didapatkan setelah diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia.

4. Indikator *Outcomes*

Peneliti akan mendeskripsikan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau Negara setelah diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain (Moleong, 2014 : 157). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Data primer yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara pihak-pihak yang bersangkutan dalam lingkup imigrasi.
2. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi. Penggunaan sumber data sekunder tidak memakan waktu yang lebih lama, dikarenakan peneliti dapat menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada (Nicholas, 2011:40). Sehingga, data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari situs resmi dan mencari informasi yang dibutuhkan di antaranya artikel-artikel yang ada di *website* yang bonafit dari penelitian sejenis terdahulu serta data yang diperoleh melalui studi pustaka, seperti buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan situs-situs pendukung.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya, cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara, angket, pengamatan, studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sedangkan teknik

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah berikut:

1. Studi Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, laporan, cendera mata, dan lain-lain. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *web site* (J. Noor, 2011:141). Studi dokumen dilakukan oleh penulis melalui koran-koran, buku-buku, jurnal-jurnal serta berita di internet yang berkaitan dengan penelitian penulis kali ini.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Menurut Koentjaraningrat, teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1984 : 420). Sedangkan, Sugiyono berpendapat bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan

sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012 : 291)

Pada studi kepustakaan ini penulis akan melakukan studi di Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung.

3. Studi Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya (J. Noor, 2011:139).

Adapun peneliti akan mewawancarai pihak Analis Keimigrasian Pertama , Bapak Melyansyah S.IP yang bertugas di Imigrasi Kelas III Kerinci, Jambi.

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal. Menurut Sygiyono (2012:244): “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang dipperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan kebijakan BVK Indonesia yang menjadi objek penelitian ini, yaitu perkembangan kebijakan BVK Indonesia serta kaitannya dengan wisatawan asing China di Indonesia. Penjelasan akan terbagi ke dalam 3 bagian. **Pertama**, memuat uraian mengenai kebijakan BVK secara umum. **Kedua**, akan dijelaskan mengenai kebijakan BVK Indonesia di Indonesia. **Ketiga**, akan dipaparkan kebijakan BVK Indonesia terhadap wisatawan China.

4.1 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan kebijakan yang disepakati oleh kedua negara dengan menandatangani perjanjian terkait bebas visa, atau jika negara pemberi bebas visa tersebut secara sepihak memberikan fasilitas bebas visa bagi negara yang diinginkan dengan tetap memperhatikan asas reciprocal (asas timbal balik). Pemberlakuan kebijakan BVK oleh negara-negara yang menetapkannya dikarenakan adanya hubungan diplomatik antar kedua negara serta ingin adanya kemudahan bagi para pengunjung ke negara tersebut sehingga dapat meningkatkan kunjungan salah satunya adalah wisatawan. Keuntungan bagi warga negara penerima BVK ini adalah tidak adanya beban biaya yang ditanggung setiap akan

berkunjung ke negara yang akan dituju, serta pengurusan dokumen visa pun tidak dibutuhkan. Bentuk visa biasanya berbentuk stempel yang akan di cap pada paspor asli, namun ada beberapa negara yang menerapkan sistem stiker, yang mana bentuk visa jenis tersebut akan ditempel pada lembaran paspor yang tersedia. Selain itu ada juga kombinasi di antara keduanya, yaitu stiker yang diberi cap di atasnya lalu terkadang terdapat tulisan tangan dari petugas pada saat visa dikeluarkan. Stiker khusus pada visa pun biasanya memakai teknologi canggih dengan tinta cetak tertentu yang dilengkapi dengan hologram untuk menghindari adanya praktik pemalsuan visa.

Penggunaan visa tidak terlepas dengan kaitannya dalam dunia hubungan internasional serta diplomasi internasional yang pada akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan terkait lintas negara dalam lingkup internasional. Masing-masing negara memiliki prosedur dan kebijakan tersendiri dalam pengurusan visa baik prosedur secara konvensional maupun *online*, sehingga berkat adanya kebijakan BVK tersebut, pengurusan pembuatan visa kunjungan pun tidak lagi diperlukan. Agar lebih rinci, penulis akan menjabarkan jenis-jenis visa yang paling banyak digunakan di bawah ini:

4.1.1. Jenis-jenis Visa

Visa biasanya terdiri atas visa bisnis, visa pelajar, visa pekerja, visa saat kedatangan dan visa kunjungan. Selanjutnya, untuk memperjelas tentang jenis-jenis visa yang telah disebutkan di atas, maka penjelasan akan dijabarkan di bawah ini:

1. Visa Bisnis

Visa ini biasanya digunakan oleh WNA untuk memasuki wilayah negara yang dituju dan melakukan kegiatan bisnis tanpa bergabung dengan pasar tenaga kerja di negara tersebut.

2. Visa Pelajar

Visa jenis ini biasanya digunakan oleh para pelajar yang ingin melaksanakan studi di negara yang akan dituju. Visa ini akan terus berlaku selama masa pendidikan masih berjalan.

3. Visa Pekerja

Visa ini dibutuhkan bagi individu yang ingin mengambil pekerjaan atau terlibat dalam kegiatan bisnis negara tuan rumah, sehingga biasanya visa jenis ini memiliki jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun.

4. Visa Saat Kedatangan (Visa On Arrival)

Jenis visa yang satu ini paling banyak digunakan para WNA saat berkunjung ke negara lain, pasalnya visa ini dapat dibuat saat tiba di negara tujuan, seperti di bandara maupun pelabuhan.

5. Visa Kunjungan

Visa ini juga paling banyak digunakan bagi para WNA yang ingin berlibur, melakukan kunjungan sosial budaya, atau tugas pemerintahan ke negara tujuan, berbeda dengan Visa On Arrival (VOA), pengguna Visa Kunjungan ini harus mengajukan pembuatan visa jauh-jauh hari sebelum keberangkatan.

Namun, Visa Kunjungan semenjak pemberlakuan BVK Indonesia tidak dipergunakan lagi bagi negara yang masuk ke dalam daftar penerima BVK

Indonesia, sebab, negara-negara tersebut mulai dibebaskan dari kepemilikan Visa Kunjungan untuk masuk ke Indonesia.

4.2 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia

Kebijakan BVK Indonesia pada awalnya diberlakukan pada 31 Maret 2003 yang tertera dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. Kebijakan BVK Indonesia pada tahun 2003 diberikan kepada 11 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong SAR, Macao SAR, Chili Maroko, Turki dan Peru. Kemudian kebijakan tersebut mengalami perubahan ketiga yang sebelumnya juga mengalami revisi yang tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2008. Pada perubahan ketiga ini demi meningkatkan kualitas hubungan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia telah menyepakati memasukkan Kamboja, Laos, dan juga Myanmar ke dalam BVK Indonesia yang tertera dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2011

Setelah itu, terjadi lagi revisi yang tertuang pada Perpres Nomor 69 Tahun 2015. Negara yang menerima keistimewaan BVK Indonesia yang sebelumnya hanya 15 negara ditambahkan kembali 30 negara (China, Rusia, Korea Selatan, Belgia, Swedia, Austria, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Mexico, Inggris, Jerman, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, dan Qatar) sehingga total negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia menjadi 45 negara pada Juli 2015.. Sedangkan amandemen terbaru terkait kebijakan ini tertuang pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016 yang pada bulan Maret kebijakan ini

kembali diperbaharui yang memberikan wewenang kepada 169 negara untuk memasuki wilayah Indonesia dengan bebas visa.

Awalnya, pemberian kebijakan BVK Indonesia diberikan secara normatif bagi WNA oleh pemerintah Indonesia dalam sebuah bentuk manifestasi dari kedaulatan negara yang dituangkan dalam *selective policy* (kebijakan saringan) terhadap orang asing yang dirasakan berguna dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara (Hamidi dan Christian, 2015:76). Oleh karena itu, masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam pemberian visa, salah satunya adalah Indonesia dalam memberlakukan kebijakan bebas visa kepada beberapa negara dengan berlandaskan asas *reciprocal* (timbang balik) yang diharapkan akan didapatkan dari negara-negara yang telah diberikan keistimewaan untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kebijakan tersebut. BVK Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi WNA tertentu untuk masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan serta masa berlaku izin tinggal selama 30 (tiga puluh) hari yang tidak dapat diperpanjang.

Persyaratan umum untuk negara-negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia diperlukan paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan beserta tiket kembali atau tiket untuk kembali melanjutkan perjalanan luar negeri. BVK Indonesia dapat digunakan dengan tujuan wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia,

dan meneruskan perjalanan ke negara lain (Imigrasi RI, 2016). Namun, berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Perpres Nomor 69 Tahun 2015, tertulis bahwa khusus 30 negara baru yang diberikan fasilitas BVK Indonesia, salah satunya negara China, hanya dapat melakukan kunjungan dalam rangka wisata ke Indonesia. Hal itu dikarenakan penambahan 30 negara baru tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi sektor pariwisata RI, dikutip dari Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam acara Dialog dan Silaturahmi Buka Bersama pada hari Rabu (8/7) 2015 silam:

“Cara mempercepat kunjungan wisatawan adalah membebaskan dari visa. Dengan itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat meningkat sebanyak 1 juta per tahun. Dengan penambahan bebas visa sekarang, kita bisa mendapat devisa sebesar 1 miliar dollar. Jika belum bebas visa, orang (wisatawan) berpikir datang ke Indonesia jadi enggan, lebih baik datang ke Malaysia yang *free* visa. Maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas berupa kebijakan tersebut.” (Nasional Kontan, 2015)

Dari pernyataan tersebut, secara gamblang Menpar RI menjelaskan ingin adanya timbal balik berupa peningkatan devisa dari sisi pariwisata serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara-negara yang telah diberikan fasilitas BVK Indonesia.

Kemudahan yang diterima oleh negara-negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia berupa dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan, hal tersebut pun secara langsung membebaskan para negara-negara BVK Indonesia tersebut bebas dari beban biaya yang harus dibayar ketika memakai visa kunjungan. Biaya visa kunjungan pun memiliki jenis yang berbeda-beda, antara lain:

1. Visa Kunjungan Satu kali Perjalanan (*Single-Entry*)

Visa yang hanya bisa dipakai 1 kali, ketika keluar melewati perbatasan negara, maka orang asing diwajibkan mengurus kembali visa untuk melanjutkan ke negara lainnya. Visa ini dapat diambil di perwakilan RI di luar negeri. Beban biaya visa ini US\$ 50,- atau sekitar Rp.700.000,- dengan tarif persetujuan visa sebesar Rp.100.000,-

2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (*Multiple-Entry*)

Visa ini dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, sosial, wisata, budaya, dan usaha yang membutuhkan beberapa kali kunjungan ke Indonesia paling lama 1 tahun dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi 60 hari. Beban biaya visa ini US\$ 110,- atau sekitar Rp. 1.500.000,- dengan tidak terlepas biaya persetujuan visa sebesar Rp. 100.000,-.

Rincian biaya di atas semenjak diberlakukannya BVK Indonesia, tidak dibebankan lagi oleh para WNA yang negaranya diberikan fasilitas BVK Indonesia.

4.3 Kebijakan BVK Indonesia Terhadap Wisatawan China

Dari sejarah panjang kebijakan BVK Indonesia seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, China merupakan salah satu dari 169 negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 10 tahun atau dari tahun 2004-2014 wisatawan China merupakan wisatawan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia, ditambah lagi pemasukan dari wisatawan China yang

berkunjung ke Indonesia mencapai angka sebesar Rp 129.141.355,- selama 10 tahun yang menduduki posisi ke 5 dari 5 yang wisatawannya memiliki pengeluaran terbanyak di Indonesia yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan China. (Badan Pusat Statistik, 2017). Selain itu, pada tahun 2014 setahun sebelum diberlakukannya BVK Indonesia bagi China, pemerintah mengharapkan kontribusi wisatawan China sebesar 970.000 jiwa (Kemenpar.go.id, 2014). Namun jumlah kunjungan wisatawan China pada tahun 2014 mampu melampaui target yang diharapkan pemerintah Indonesia sebelumnya, yaitu mencapai 1.052.705 jiwa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa ada kenaikan sebesar 8,52 % yang melampaui target wisatawan China yang diharapkan pemerintah Indonesia. (Kemenpar.go.id, 2016)

Hingga pada akhirnya pada tahun 2015, Indonesia tanpa ragu memberikan keistimewaan berupa bebas visa Indonesia yang diperuntukkan bagi wisatawan China bahkan menetapkan wisatawan China sebagai target utama pasar pariwisata RI dengan tetap memperhatikan asas timbal balik di dalamnya.

4.3.1. Hubungan Diplomatik Indonesia-China

Indonesia dan China mulai menjalin hubungan diplomatik sejak 13 April 1950. Pada era Presiden Soekarno menjadi tonggak sejarah betapa pentingnya hubungan antara Indonesia-China pada masa itu. Hubungan kedua negara semakin erat dengan hadirnya Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-25 April 1955. Indonesia-China pun sepakat mempererat hubungan pada masa itu ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan serta persetujuan kerjasama kebudayaan bilateral pada 1 April 1961.

Namun, pada tanggal 30 November 1967 kedua negara terpaksa membekukan hubungan diplomatik yang telah dijalin beberapa tahun dikarenakan peristiwa 30 November (Indonesia.cri.cn, 2009)

Pada Juli 1985, Indonesia dan China kembali menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) untuk kembali membuka perdagangan langsung antar kedua negara yang sempat terhenti, kemudian dilanjutkan dalam pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ali Alatas dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut mendapatkan hasil pada 3 Juli 1990 ketika kedua menlu menandatangani Komunike Bersama "*The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries*" di Beijing, China diikuti dengan kedatangan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990 (Tirto.id, 2016).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan China kembali berjalan dan berkembang semenjak pemulihan hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1985-1990 silam. Presiden Soeharto juga melakukan kunjungan balasan pada 14-18 November 1990 dan menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknik. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan China, hingga akhirnya pada 1996 China menjadi mitra dialog penuh ASEAN (Tirto.id, 2016).

Selanjutnya, pada era Presiden Megawati, hubungan bilateral antara Indonesia-China semakin erat dengan 'diplomati dansa' sebagai ikon hubungan

kedua negara tersebut yang membentuk forum energi yang merupakan payung investasi Indonesia-China di bidang energi. Hingga pada akhirnya hubungan yang telah lama dirintis tersebut semakin dikelola dengan baik oleh Presiden Indonesia ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dalam 2 periode kepemimpinan sang presiden membentuk beberapa perjanjian penting dengan China, yaitu Kemitraan Strategis pada tahun 2015 yang kemudian ditingkatkan Kemitraan Strategis Komprehensif pada Oktober 2013. Semenjak saat itu, hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya antara Indonesia-China semakin meningkat (Tirto.id, 2016).

4.3.2. Kerjasama China-Indonesia di Bidang Pariwisata

Kunjungan wisatawan China yang cukup pesat pada tahun 2004-2014 selain membuat Indonesia memasukkan China ke dalam daftar BVK Indonesia pada tahun 2015, Indonesia juga pada akhirnya mempertimbangkan China sebagai pasar utama pariwisata Indonesia. Sehingga dari hasil pertimbangan tersebut, dibutuhkan upaya agar potensi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dari itu pada 26 Maret 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between The People's Republic of China and The Republic of Indonesia* di Beijing, China yang berlangsung dalam *BOAO Forum Asia (BFA) Annual Conference* yang berlangsung dari tanggal 26-28 Maret 2015.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak negara membicarakan lebih lanjut terkait kerjasama hubungan bilateral salah satunya adalah kaitan dengan

pertukaran budaya kedua negara. Dalam *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between The People's Republic of China and The Republic of Indonesia*, kedua negara memberikan fokus perhatian pada 5 pokok bidang, yaitu:

1. *Political, Defense, and Security;*
2. *Trade, Investment, and Economic Development;*
3. *Maritime, Aeronautics, Science & Technology;*
4. *Cultural and Social Affairs;*
5. *International and Regional Affairs.*

Dari 5 pokok bahasan dalam isi perjanjian tersebut, pada bagian *Cultural and Social Affairs* tertulis bahwa pemerintah China cukup mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah memberikan BVK Indonesia bagi China seperti yang tertuang dalam perjanjian nomor 29 dalam *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between The People's Republic of China and The Republic of Indonesia* berikut ini:

“China welcomed the recent announcement by the government of Indonesia to waive tourist visa requirements for Chinese citizens. The two sides agreed to further promote tourism cooperation so as to reach the annual target of over 2 million exchange of visits at an early date. The two sides also agreed to promote cooperation in cultural heritage tourism. In this regard, Indonesia invited Chinese tourists to appreciate its new tourism package to trace the voyage of Admiral Zheng He in Indonesia. The two sides were committed to exploring mutually beneficial projects and initiatives through the Indonesia China Joint Working Group on Tourism Cooperation and enhancing consultation and coordination to synergize their positions on tourism issues discussed in multilateral fora. The two sides will also work to advance a collaborative program on ex-situ conservation of Giant Panda and Komodo Dragon.” (China-embassy.org, 2015)

Selain mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang memasukkan China ke dalam salah satu negara yang mendapatkan fasilitas BVK Indonesia, ditambah lagi kedua belah pihak sepakat untuk lebih gencar dalam mempromosikan kerjasama dalam bidang pariwisata demi tercapainya target tahunan sebanyak 2 juta kunjungan bagi masing-masing negara serta lebih fokus dalam mempromosikan pariwisata di bidang cagar budaya seperti program kerjasama perlindungan *Giant Panda* dan *Komodo Dragon*. Kedua negara juga sepakat untuk saling menguntungkan dan mengeksplorasi program lain melalui *Indonesia China Joint Working Group on Tourism*. Hal terkait mempromosikan pariwisata Indonesia serta meningkatkan kunjungan wisatawan juga telah dibahas pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan:

“Bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.” (Perpres No 21 Th. 2016)

Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam transportasi udara untuk memfasilitasi salah satunya pariwisata, yang tertuang dalam bagian *Trade, Investment, and Economic Development* nomor 21:

“The two sides agreed to enhance air transport cooperation between the two countries so as to facilitate the growth of economic, trade and tourism relations, as well as people-to-people contact between China and Indonesia.” (China-embassy.org, 2015)

Sebelumnya, dikutip dari berita utama di website resmi Imigrasi RI, China telah menyinggung pembahasan terkait bebas visa yang akan diberikan kepada

Indonesia pada tahun 2013. Saat dilakukan konfirmasi perihal berita tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), pihak Kemenakertrans menyatakan belum mendengar perihal tawaran tersebut, bahkan pihak Kemenakertrans kembali mempertanyakan apakah tawaran tersebut benar mengenai bebas visa, dikarenakan China sendiri belum memberlakukan *Visa On Arrival* bagi Indonesia. Tawaran bebas visa tersebut disampaikan oleh pemerintah China dalam Forum Konsultasi Ke-7 Bidang Kekonsuleran dan Keimigrasian Indonesia dan Tiongkok yang berlangsung pada tanggal 26 November 2013, namun perundingan tersebut belum diagendakan antar kementerian terkait.

Pada akhirnya, Indonesia yang terlebih dahulu memasukkan China ke dalam daftar BVK Indonesia, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, dikarenakan wisatawan China berpotensi menyumbang devisa negara, seperti yang dikutip dalam REPUBLIKA pada tahun 2017:

“Untuk bebas visa kita masih *on the track*. Karena *by travel agent* pergerakan masuk dan juga keluar wisatawan China meningkatkan devisa negara kita” (Republika.co.id, 2017).

Dari penjelasan di atas, terlihat pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada wisatawan China setelah diberlakukannya BVK Indonesia. Terlebih lagi, China sampai sekarang pun belum memberlakukan BVK bagi Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mengharapkan adanya timbal balik setelah diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan China serta pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis untuk mengetahui evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan Indonesia dalam meningkatkan arus wisatawan asing ke Indonesia tahun 2015-2017 (studi kasus: wisatawan China) sesuai dengan tujuan dari kebijakan BVK Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ini telah berhasil dalam meningkatkan arus wisatawan mancanegara serta peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata. Ditambah lagi adanya peran pemerintah RI yang cukup serius dalam membentuk kebijakan ini. Namun, kebijakan ini menurut penulis kurang efektif diberlakukan bagi wisatawan China.

Apabila dilihat dari persentase kunjungan wisatawan China memang mengalami peningkatan setelah diberlakukannya BVK, namun, persentase peningkatan tersebut hanya naik sekitar 1% di setiap tahunnya. Selain itu jika dilihat dari segi kontribusi wisatawan China setelah diberlakukannya BVK Indonesia, menurut pandangan penulis hal tersebut kurang memuaskan, terlebih pemerintah Indonesia cukup mengandalkan wisatawan China di samping wisatawan lainnya untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor

pariwisata, namun kenyataan di lapangan, kontribusi wisatawan China terhadap devisa pariwisata RI jika dilihat dari rata-rata total belanja mereka hanya sebesar 0,9%. Ditambah lagi, banyaknya pelanggaran yang didominasi WN China setelah kebijakan BVK Indonesia diberlakukan bagi mereka menunjukkan bahwa sebagian besar WN China masih belum mampu mengikuti peraturan kebijakan BVK Indonesia. Penjelasan kesimpulan tersebut berdasarkan pada 4 indikator yang menjadi fokus penelitian penulis untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada kebijakan ini. Adapun indikator evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator *Input*

Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk keberlangsungan kebijakan BVK Indonesia. Keseriusan pemerintah terlihat dari sisi SDM yaitu peran dari berbagai pihak seperti pihak Kemenpar, pihak Keimigrasian dan kepala daerah yang saling bersinergi dalam mewujudkan tujuan BVK Indonesia serta terlihat pembangunan fisik infrastruktur untuk mendukung perkembangan destinasi pariwisata. Akan tetapi, pada indikator input ini terlihat masih adanya hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata RI. Lalu, selama penelitian, penulis juga belum menemukan adanya transparansi dari pemerintah terkait biaya kebijakan BVK Indonesia.

2. Indikator *Process*

Pada indikator ini digunakan untuk lebih menjabarkan serta mengevaluasi proses-proses kebijakan ini dapat berjalan pada awal mulanya. Pemerintah Indonesia telah lama serta sangat serius dalam menetapkan kebijakan BVK Indonesia, terlihat dari berbagai macam pembaharuan kebijakan demi semakin memperjelas tujuan dari kebijakan BVK Indonesia ini. Selanjutnya, dari sisi proses promosi pariwisata, pihak Kemenpar RI pun sangat fokus dalam melaksanakan tugasnya untuk mempromosikan pariwisata RI ke kancah Internasional dikarenakan tanpa adanya promosi pariwisata itu sendiri, kebijakan BVK Indonesia yang tujuan utamanya untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan ekonomi dari sektor pariwisata menjadi tidak maksimal.

3. Indikator *Outputs*

Indikator *outputs* yaitu merupakan indikator untuk mengevaluasi hasil yang langsung didapatkan semenjak kebijakan BVK Indonesia diberlakukan. Pada indikator ini menunjukkan bahwa harapan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan salah satunya wisatawan China, namun pertumbuhan kunjungan wisatawan China ke Indonesia hanya mampu naik sekitar 1% di setiap tahunnya serta terlihat pula pengeluaran rata-rata wisatawan China selama berkunjung ke Indonesia masih belum mampu melampaui rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara lain. Selain itu permohonan VOA setelah diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia mengalami penurunan

sebesar 80,5%. Hal ini juga berdampak pada PNBPNegara yang menurun drastis hingga 52% .

4. Indikator *Outcomes*

Indikator *outcomes* digunakan untuk mengevaluasi dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau Negara serta respon dari target (wisatawan China) setelah diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia. Terdapat peningkatan devisa pariwisata RI selama 3 tahun berturut-turut semenjak diberlakukannya kebijakan BVK Indonesia (2015-2017) selalu melampaui target pemerintah. Sehingga total pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata adalah USD 40,86 miliar yaitu sebanyak Rp. 571 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar kebijakan BVK Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi RI dari sektor pariwisata telah berhasil. Namun, Total kontribusi wisatawan China dalam pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata hanya mencapai Rp. 45.213.896,-. Angka tersebut tergolong sangat sedikit serta tidak mencapai harapan pemerintah terhadap wisatawan China yang dianggap mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi RI dari sektor pariwisata dilihat dari rata-rata belanja wisman China yang berkontribusi pada devisa pariwisata hanya sebesar 0,9%. Hal tersebut juga berkaitan dengan praktik monopoli dari *zero dollar tour* yang merugikan wisatawan serta negara tujuan wisata. Selain itu, pada indikator ini juga terlihat peningkatan orang asing Overstay setelah diberlakukannya BVK Indonesia dan pelanggaran orang asing yang menggunakan BVK ternyata di dominasi oleh WN China

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian pemerintah terhadap rata-rata pengeluaran wisatawan yang seharusnya sebanding dengan peningkatan kunjungan wisatawan demi menunjang kontribusi terhadap devisa dari sektor pariwisata;
2. Peningkatan koordinasi dan kerja sama terhadap pihak-pihak tertentu seperti TNI-Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Kemenpar, Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing.
3. Perlunya pengawasan yang semakin diperketat terkait praktik *zero dollar tour* yang merugikan wisatawan maupun negara tujuan destinasi pariwisata salah satunya adalah membuat daftar atau melakukan registrasi Travel Agent (TA) dan Travel Operator (TO) sehingga mudah melakukan pengontrolan ketika terjadi keluhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashari, Khasam. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Bogdan, Taylor 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian. Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bridgman & Davis. 2000. *Policy Handbook. Australia*
- Hamidi, Jazim. Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Terjemah Wawan Juanda). Bandung: Bina Cipta
- Holsti, K.J. 1998. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,. Bandung.
- John P. Campbell. 1974. *The Measurement of Organizational Effectiveness: A Review of Relevant Research And Opinion*. California: Navy Personnel Reseach and Development Center.
- Kurniawan, Farida. 2016. *Efektivitas Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moertopo
- Umar S. Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi dan Jurnal

- Alamsjah, Iqbal. 2016. *Paparan Kementerian Pariwisata RI*. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Kemenpar RI.
- Haryanto, Joko Tri. 2019. *Kesesuaian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dan Permasalahan Pariwisata di Indonesia*. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI.
- Hudson, Valerie. 2015. *Foreign Policy Analysis: Actor Specific Theory and The Ground Of International Relation*. Brigham Young University
- Jazuli, Ahmad. 2016. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10
- Lan, Thung Ju. 2016. *Chinese Indonesians and China-Indonesia Relations*. Research Center for Society and Culture. Indonesian Institute of Science.
- Maulidina, Athira, 2017. *Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan TKA Ilegal asal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan NKRI*. Universitas Hasanuddin
- Nyiri, Pal. 2002. *Globalising Chinese Migration: New Spaces, New Meanings*. Central European University
- Purwanto, Supriadi. Wang Ling. 2016. *Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok di Luar Negeri: Sebuah Studi Literatur*, Donghua University.
- Rahayu, Erna. 2016. *Dampak Kebijakan Bebas Visa bagi Warga Negara China (RRC) terhadap Munculnya TKA Ilegal*.
- Rallu, Jean Luois. 2002. *International Migration in South-East Asia: The Role of China*. Institut National d'Etudes Demographiques.
- Sayoga, Pundy. Syamsurijal Tan. 2017. *Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya*. Jurnal Ekonomi Universitas Jambi
- Setiawan, Rony Ika. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Pariwisata di Daerah Berkembang*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Blitar.
- Sukirman, Oman. 2016. *Apakah Anggaran Pemasaran Pariwisata Pemerintah Efektif dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara*. Universitas Pendidikan Indonesia

Taryono, Rita Yani Iyan dan Rahmita B. Ningsih. 2009. *Studi Tentang Migrasi dan Implikasinya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Ekonomi Universitas Riau.

Web Resmi

Bebas Visa Percepat Pertumbuhan Pariwisata, diakses melalui:

<http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-bebas-visa-percepat-pertumbuhan-pariwisata>. Pada 20 Januari 2019.

BRS (Berita Resmi Statistik), diakses melalui:

<https://www.bps.go.id/menu/12/berita-resmi-statistik.html>, pada 4 April 2018.

China Pasar Utama Pariwisata RI, diakses melalui:

<http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-china-pasar-utama-pariwisata-indonesia>, Pada 4 April 2020

Target PNBK Kemenkumham 2017 Turun, diakses melalui:

<https://kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/target-pnbk-kemenkumham-tahun-2017-turun-signifikan>, Pada 4 April 2020

Informasi APBN 2018, diakses melalui:

[www.kemenkeu.go.id › apbn2018](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018), Pada 20 Maret 2019.

Informasi APBN 2019, diakses melalui:

[www.kemenkeu.go.id › buku-informasi-apbn-2019](http://www.kemenkeu.go.id/buku-informasi-apbn-2019). Pada 20 Maret 2019.

Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, diakses melalui :

<https://www.kemenpar.go.id/categories/laporan-keuangan>, Pada 1 Januari 2019.

Paparan Kementerian Pariwisata pada Rakornas, diakses melalui:
<https://maritim.go.id/portfolio/paparan-kemenpar-rakornas-2017/>, Pada 6 Januari 2020

Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, diakses melalui:
<https://www.bps.go.id/publication/2019/08/28/f2e676c8c2b7ae3346a28b8>

[8/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2018.html](#), Pada 4 April 2018.

Tiongkok Tawarkan Bebas Visa, diakses melalui: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/329-tiongkok-tawarkan-bebas-visa> . Pada 9 Desember 2018.

Visa Requirements, diakses melalui:

<https://www.embassyofindonesia.org/index.php/visa-requirements/>. Pada 20 Maret 2019

Situs Lain:

143 TKA China Masuk Surabaya, Ini Respon Imigrasi, diakses melalui:

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3378293/143-tenaga-kerja-asal-china-masuk-surabaya-ini-respon-imigrasi>. Pada 1 Januari 2020.

9 WNA China Jadi Buruh Pembuat Bata, Diamankan Imigrasi, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/9-wna-asal-china-jadi-buruh-pembuat-bata-diamankan-imigrasi-bekasi.html>. Pada 1 Januari 2020

Diduga Kerja Ilegal, 3 WN China Diamankan di Kantor Imigrasi, diakses melalui:

<https://regional.kompas.com/read/2016/04/21/20322451/Diduga.Kerja.Ilegal.3.WN.China.Diamankan.di.Kantor.Imigrasi.Sukabumi>.

Ditjen Imigrasi Cegah 4 WN China Masuk Indonesia, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hari-ini-ditjen-imigrasi-cegah-empat-orang-china-masuk-indonesia.html>. Pada 1 Januari 2020

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pakai-visa-kunjungan-ke-penambangan-enam-wn-china-dicokok-imigrasi.html>. Pada 1 Januari 2020.

Imigrasi Banjarmasin Tangkap 10 WN China di Rumah Penduduk, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/imigrasi-banjarmasin-tangkap-10-wna-china-di-rumah-penduduk.html>. Pada 1 Januari 2019.

Kemenaker Amankan 41 TKA Ilegal Asal China, diakses melalui:

<https://republika.co.id/berita/ohbyz7383/kemenaker-amankan-41-tka-ilegal-asal-cina>. Pada 23 Desember 2019.

Kronologi TNI AU Tangkap 5 buruh China di Lanud Halim, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-tni-au-tangkap-5-buruh-china-di-lanud-halim.html>. Pada 23 Desember 2019.

Menyalahgunakan Visa, 4 WNA Asal China Dideportasi, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/menyalahgunakan-visa-4-wna-asal-china-dideportasi-imigrasi-kediri.html>. Pada 23 Desember 2019.

Pakai Visa Kunjungan ke Penambangan, 6 WN China Dicokok Imigrasi, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pakai-visa-kunjungan-ke-penambangan-enam-wn-china-dicokok-imigrasi.html>. Pada 1 Januari 2020.

Pakai Visa Kunjungan, 2 WN China Bekerja di Tambang Emas, diakses melalui:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pakai-visa-kunjungan-2-wn-china-malah-bekerja-di-tambang-emas.html>. Pada 23 Desember 2019.